

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

PERIODE JULI - DESEMBER

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Rencana Kerja.....	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	3
1.4.3 Metode Survei.....	3
BAB II METODOLOGI.....	4
2.1 Metode Penelitian	4
2.2 Populasi Dan Sampel.....	4
2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	5
2.5 Teknik Analisis Data	5
2.6 Tahapan pelaksanaan	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	8
3.1 Profil Responden.....	8
3.2 Profil Responden Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan8	
3.2.1 Profil Responden Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Pekerjaan.....	9
3.2.2 Profil Responden Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Usia	10
3.3 Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3.1 Indikator Manipulasi Peraturan.....	11
3.3.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	12
3.3.3 Indikator Menjual Pengaruh	13
3.3.4 Indikator Transparansi Biaya.....	14
3.3.5 Indikator Biaya Tambahan.....	15
3.3.6 Indikator Hadiah	16
3.3.7 Indikator Transparansi Pembayaran.....	17
3.3.8 Indikator Percaloan	18

3.3.9 Indikator Perbuatan Curang	19
3.3.10 Indikator Transaksi Rahasia	20
3.4 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta.....	21
3.5 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta	23
BAB IV PENUTUP	24
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Rekomendasi	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Model Alur Penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas	6
Gambar 2 - Tingkat Pendidikan Responden	8
Gambar 3 - Jenis Pekerjaan Responden.....	9
Gambar 4 - Usia Responden	10
Gambar 5 - Grafik pada indikator manipulasi peraturan	11
Gambar 6 - Grafik pada indikator penyalahgunaan jabatan.....	12
Gambar 7 - Grafik pada indikator menjual pengaruh	13
Gambar 8 - Grafik pada indikator transparansi biaya	14
Gambar 9 - Grafik pada indikator biaya tambahan.....	15
Gambar 10 - Grafik pada indikator hadiah	16
Gambar 11 - Grafik pada indikator transparansi pembayaran	17
Gambar 12 - Grafik pada indikator percaloan	18
Gambar 13 - Grafik pada indikator perbuatan curang	19
Gambar 14 - Grafik pada indikator transaksi rahasia.....	20
Gambar 15 - Grafik indeks persepsi korupsi semua indikator.....	22
Gambar 16 - Grafik indeks persepsi chart balok.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Ruang Lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi	6
Tabel 2 - Nilai Persepsi	7
Tabel 3 - Indeks pada indikator manipulasi peraturan	11
Tabel 4 - Indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan	12
Tabel 5 - Indeks pada indikator menjual pengaruh	13
Tabel 6 - Indeks pada indikator transparansi biaya	14
Tabel 7 - Indeks pada indikator biaya tambahan	15
Tabel 8 - Indeks pada indikator hadiah	16
Tabel 9 - Indeks pada indikator transparansi pembayaran	17
Tabel 10 - Indeks pada indikator percaloan	18
Tabel 11 - Indeks pada indikator perbuatan curang	19
Tabel 12 - Indeks pada indikator transaksi rahasia	20
Tabel 13 - Persepsi korupsi satuan kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta	21
Tabel 14 - Isian masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a) Kuesioner.
 - b) Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c) Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a) Jumlah Responden.
 - b) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Agama Yogyakarta

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan atau data minimal 120 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta). Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya.

Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1 - Model Alur Penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 1 - Ruang Lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran

No	Ruang lingkup
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 2 - Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 2.59	25.00 - 64.99	1	Tidak bersih dari korupsi
2	2.60 – 3.06	65.00 – 76.60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3.06 – 3.53	76.61 – 88.30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.53 – 4.00	88.31 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

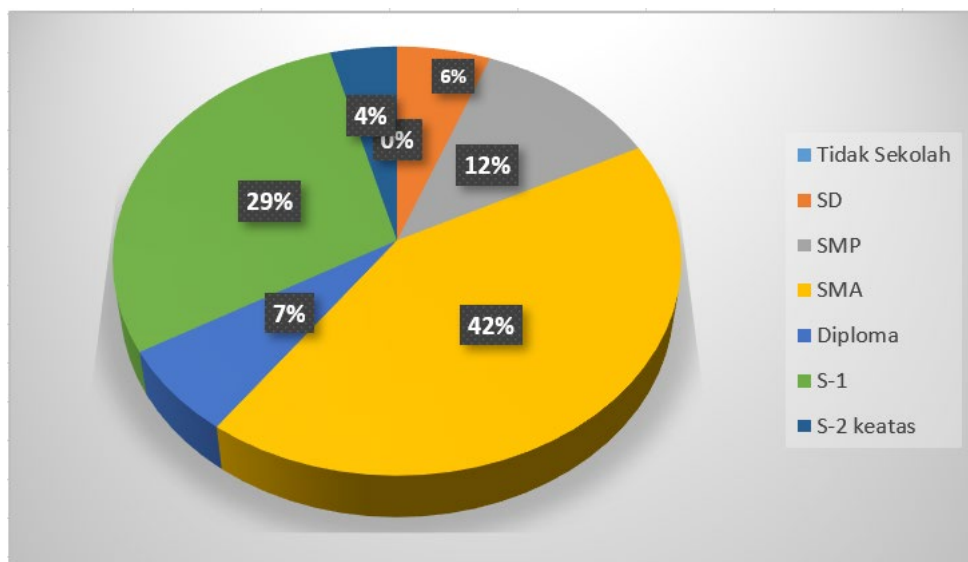
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

Responden Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan Masyarakat Pencari Keadilan/ Para Pihak Berperkara yang menerima pelayanan public di Pengadilan Agama Yogyakarta. Responden untuk Survey Indeks Persepsi Korupsi Periode Semester II Tahun 2022 ini sebanyak 120 responden dengan karakteristik profil sebagai berikut :

3.2 Profil Responden Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan

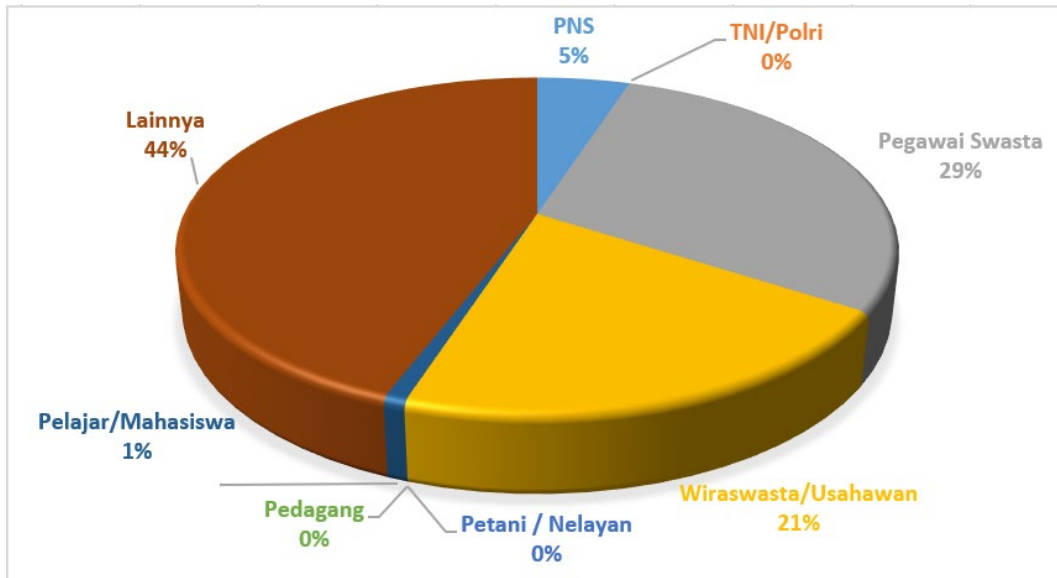
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta mayoritas memiliki latar Pendidikan SMA (sebanyak 42%) dan Sarjana/S-1 (sebanyak 29%).



Gambar 2 - Tingkat Pendidikan Responden

3.2.1 Profil Responden Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Pekerjaan

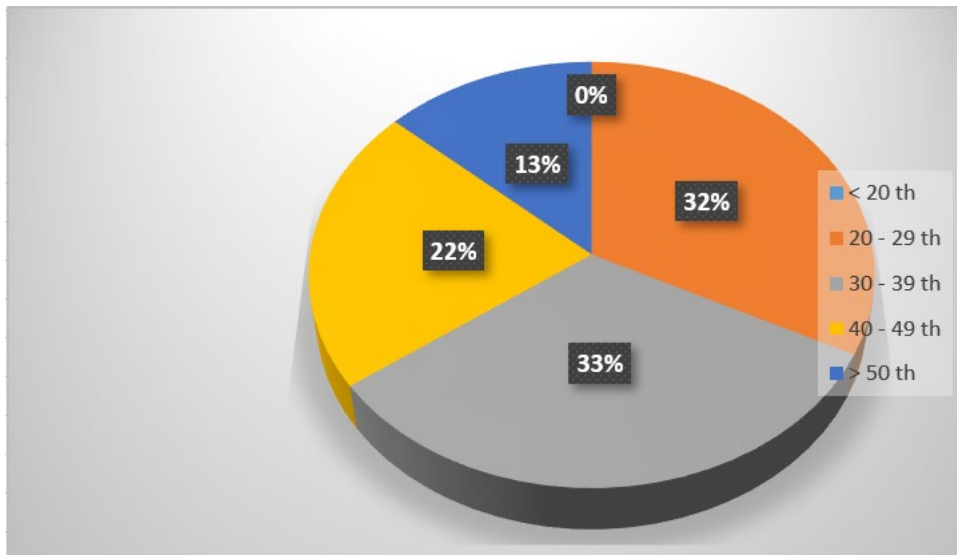
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 44% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai lainnya seperti Ibu Rumah Tangga/Buruh/dsb.



Gambar 3 - Jenis Pekerjaan Responden

3.2.2 Profil Responden Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan Usia

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 30 s/d 39 tahun sebesar 33%. Bagi kelompok usia antara 20 s/d 29 tahun sebesar 32%, kelompok usia dibawah 40 s/d 49 tahun sebesar 22%, kelompok dibawah 20 tahun sebesar 0% dan diatas 50 tahun memiliki jumlah sebesar 13%.



Gambar 4 - Usia Responden

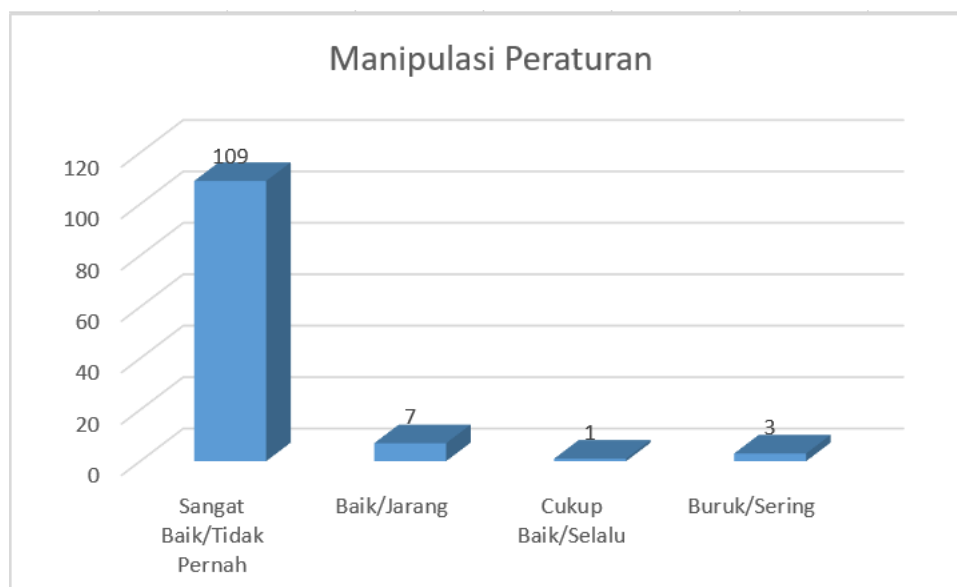
3.3 Indeks persepsi korupsi per indikator

3.3.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3.85. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 3 - Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	Jawaban	SKOR	Frekuensi	%	Skor*f
1	Sangat Baik/ Tidak Pernah	4	109	91	436
2	Baik/ Jarang	3	7	6	21
3	Cukup Baik/ Selalu	2	1	1	2
4	Buruk/ Sering	1	3	3	3
Jumlah			120	100	462
NRR Per Unsur					3,85



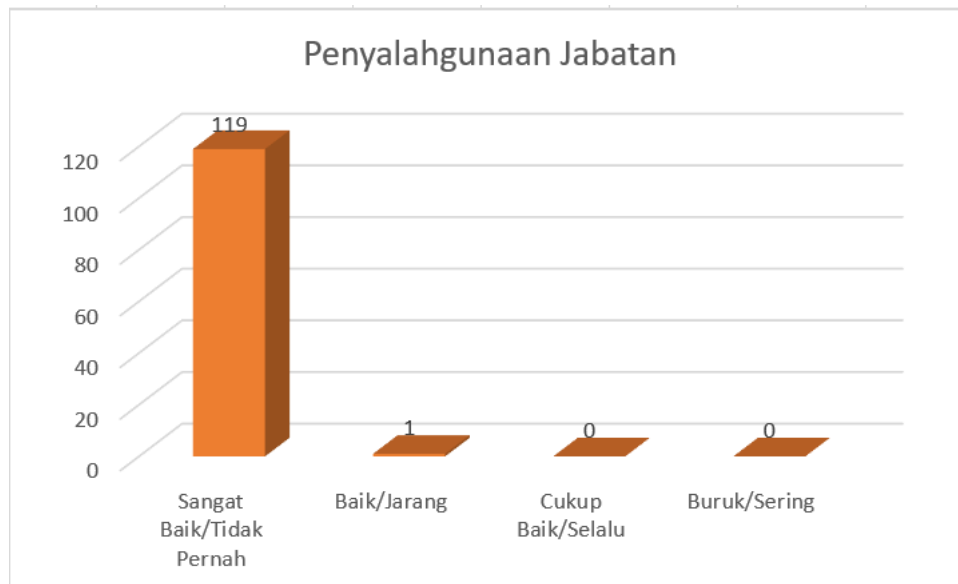
Gambar 5 - Grafik pada indikator manipulasi peraturan

3.3.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3.99. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 4 - Indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	SKOR	Frekuensi	%	Skor*f
1	Sangat Baik/ Tidak Pernah	4	119	99	476
2	Baik/ Jarang	3	1	1	3
3	Cukup Baik/ Selalu	2	0	0	0
4	Buruk/ Sering	1	0	0	0
Jumlah			120	100	479
NRR Per Unsur					3,99



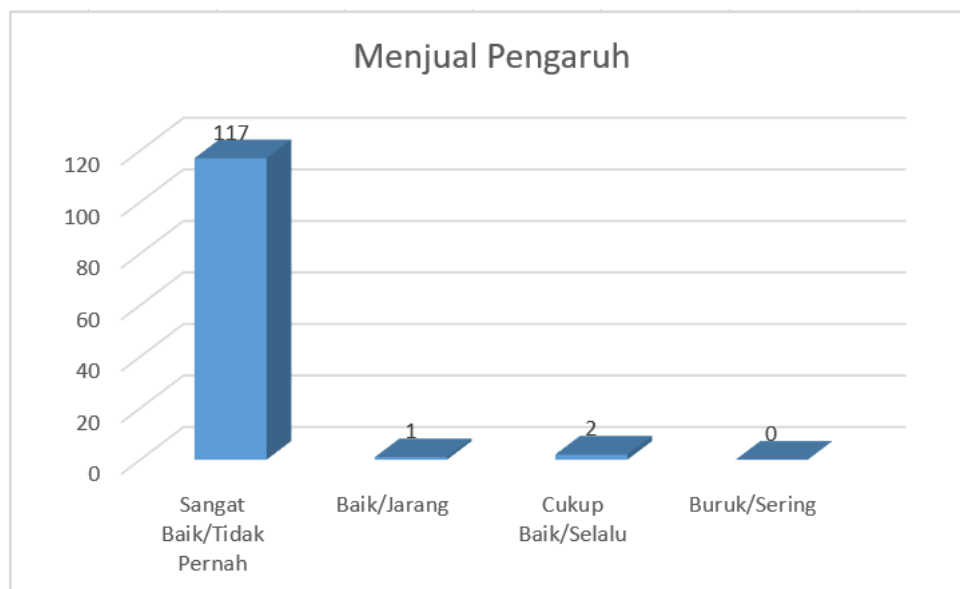
Gambar 6 - Grafik pada indikator penyalahgunaan jabatan

3.3.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3.96. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta bersih dari menjual pengaruh.

Tabel 5 - Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Jawaban	SKOR	Frekuensi	%	Skor*f
1	Sangat Baik/ Tidak Pernah	4	117	98	468
2	Baik/ Jarang	3	1	1	3
3	Cukup Baik/ Selalu	2	2	2	4
4	Buruk/ Sering	1	0	0	0
Jumlah			120	100	475
NRR Per Unsur					3,96



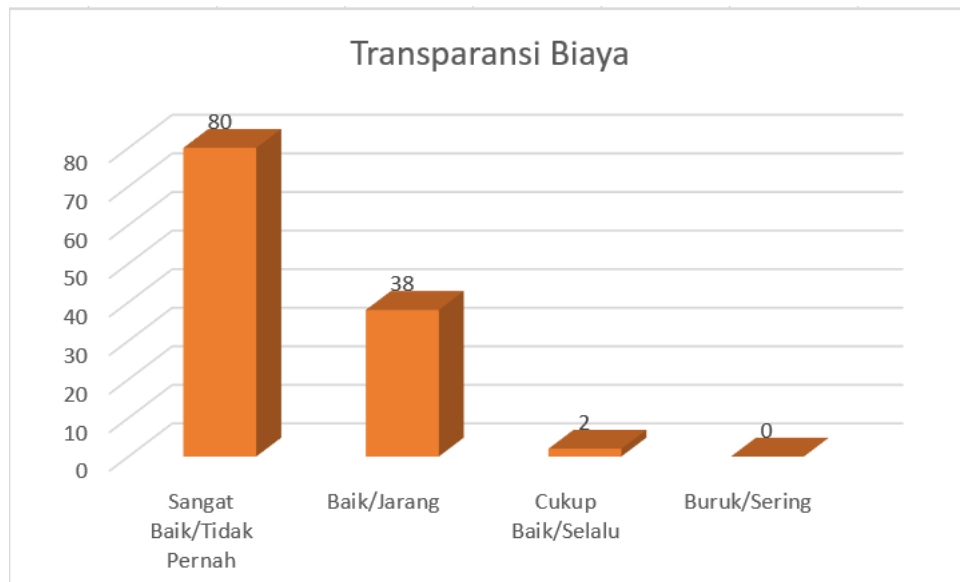
Gambar 7 - Grafik pada indikator menjual pengaruh

3.3.4 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.65. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta bersih dari transaksi yang bersifat rahasia.

Tabel 6 - Indeks pada indikator transparansi biaya

No	Jawaban	SKOR	Frekuensi	%	Skor*f
1	Sangat Baik/ Tidak Pernah	4	80	67	320
2	Baik/ Jarang	3	38	32	114
3	Cukup Baik/ Selalu	2	2	2	4
4	Buruk/ Sering	1	0	0	0
Jumlah			120	100	438
NRR Per Unsur					3,65



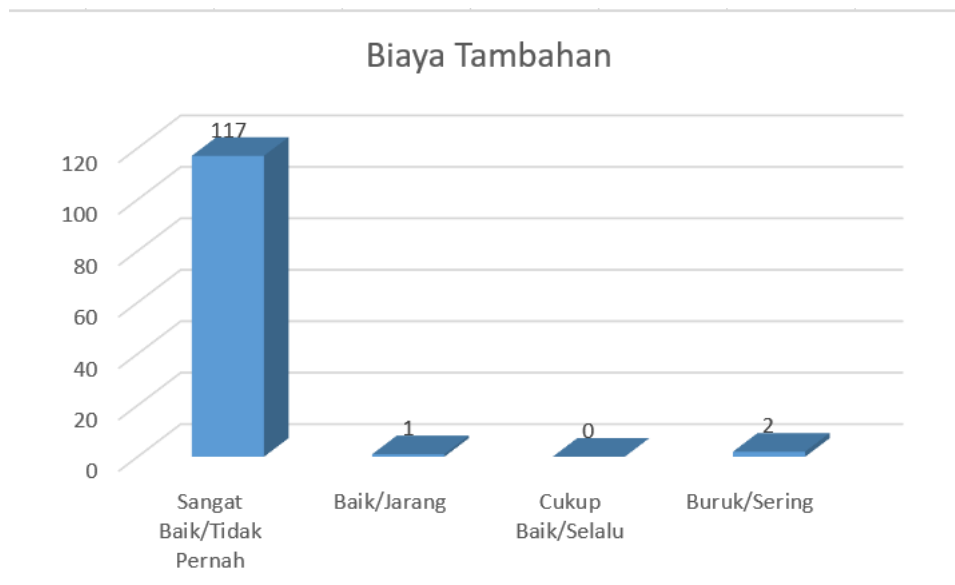
Gambar 8 - Grafik pada indikator transparansi biaya

3.3.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3.94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta bersih dari biaya tambahan dalam proses pelayanan.

Tabel 7 - Indeks pada indikator biaya tambahan

No	Jawaban	SKOR	Frekuensi	%	Skor*f
1	Sangat Baik/ Tidak Pernah	4	117	98	468
2	Baik/ Jarang	3	1	1	3
3	Cukup Baik/ Selalu	2	0	0	0
4	Buruk/ Sering	1	2	2	2
Jumlah			120	100	473
NRR Per Unsur					3,94



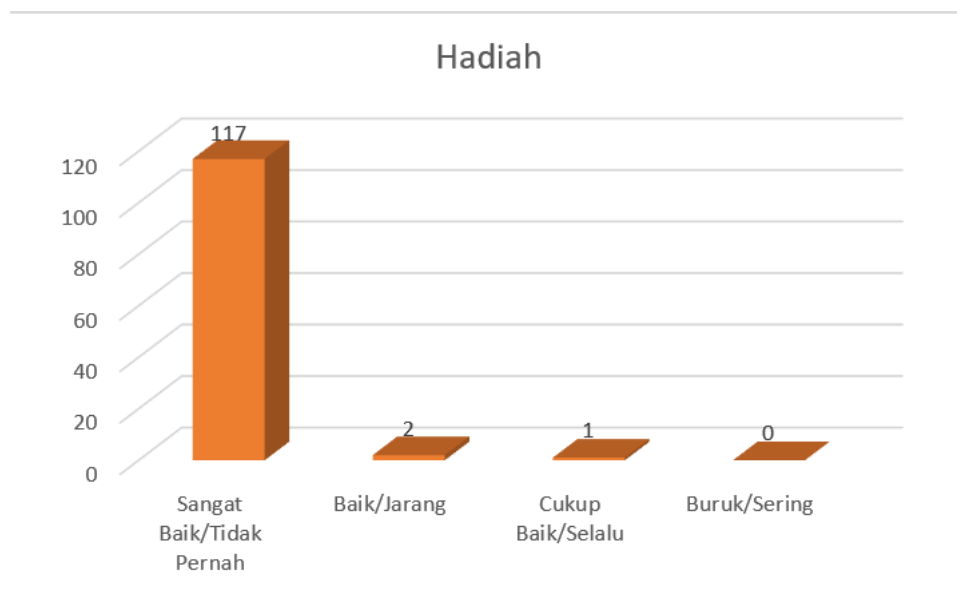
Gambar 9 - Grafik pada indikator biaya tambahan

3.3.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta bersih dari pemberian hadiah pihak.

Tabel 8 - Indeks pada indikator hadiah

No	Jawaban	SKOR	Frekuensi	%	Skor*f
1	Sangat Baik/ Tidak Pernah	4	117	98	468
2	Baik/ Jarang	3	2	2	6
3	Cukup Baik/ Selalu	2	1	1	2
4	Buruk/ Sering	1	0	0	0
Jumlah			120	100	476
NRR Per Unsur					3,97



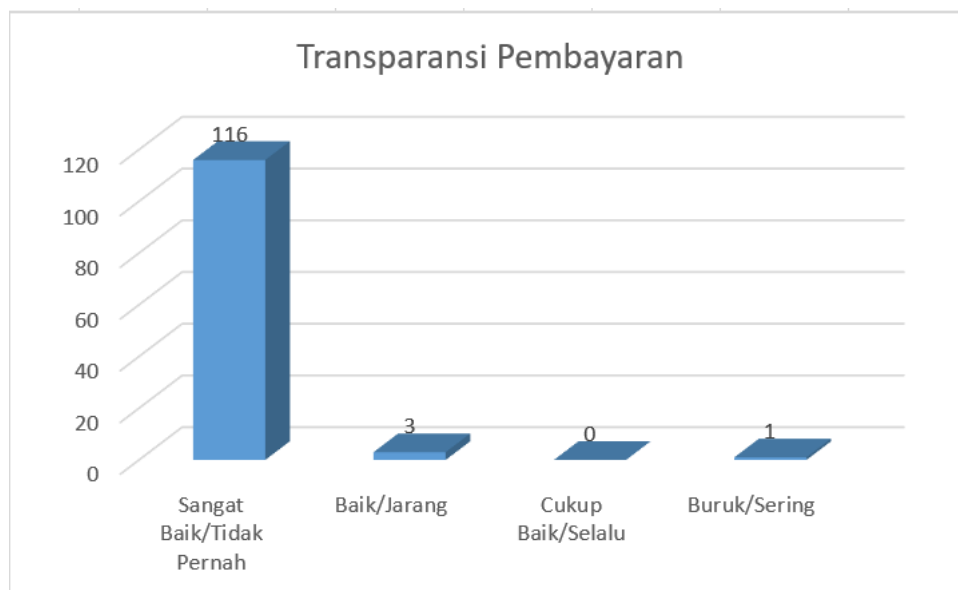
Gambar 10 - Grafik pada indikator hadiah

3.3.7 Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta bersih dan transparansi dalam pengelolaan pembayaran dan pembiayaan.

Tabel 9 - Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No	Jawaban	SKOR	Frekuensi	%	Skor*f
1	Sangat Baik/ Tidak Pernah	4	116	97	464
2	Baik/ Jarang	3	3	3	9
3	Cukup Baik/ Selalu	2	0	0	0
4	Buruk/ Sering	1	1	1	1
Jumlah			120	100	474
NRR Per Unsur					3,95



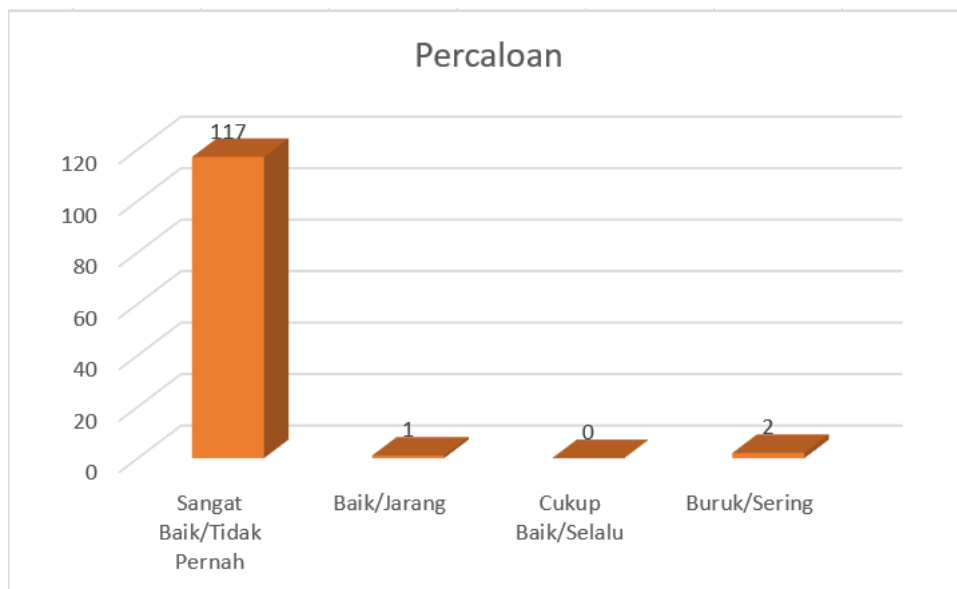
Gambar 11 - Grafik pada indikator transparansi pembayaran

3.3.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3.94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 10 - Indeks pada indikator percaloan

No	Jawaban	SKOR	Frekuensi	%	Skor*f
1	Sangat Baik/ Tidak Pernah	4	117	98	468
2	Baik/ Jarang	3	1	1	3
3	Cukup Baik/ Selalu	2	0	0	0
4	Buruk/ Sering	1	2	2	2
Jumlah			120	100	473
NRR Per Unsur					3,94



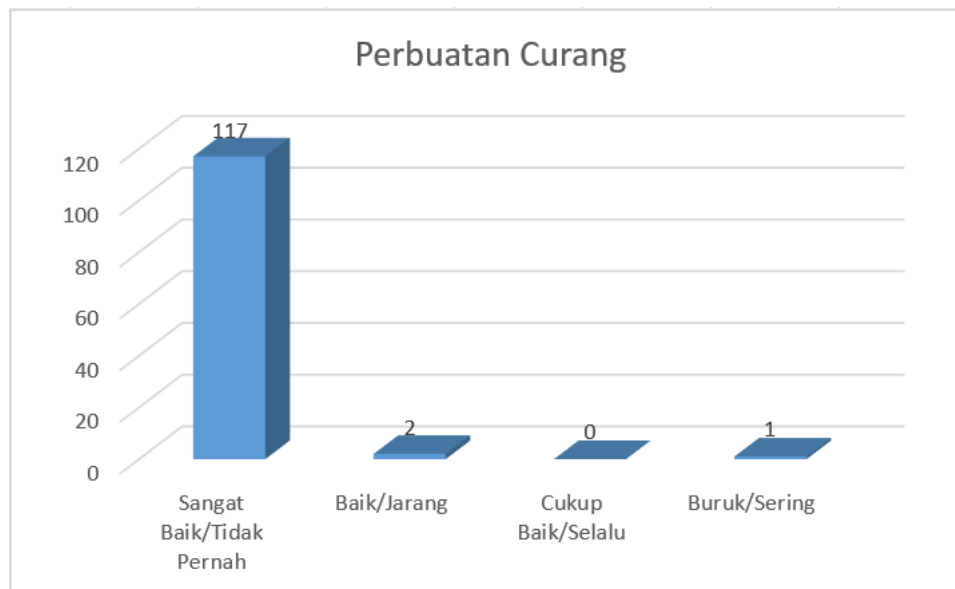
Gambar 12 - Grafik pada indikator percaloan

3.3.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta bersih dari tindakan perbuatan curang.

Tabel 11 - Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Jawaban	SKOR	Frekuensi	%	Skor*f
1	Sangat Baik/ Tidak Pernah	4	117	98	468
2	Baik/ Jarang	3	2	2	6
3	Cukup Baik/ Selalu	2	0	0	0
4	Buruk/ Sering	1	1	1	1
Jumlah			29	100	475
NRR Per Unsur					3,96



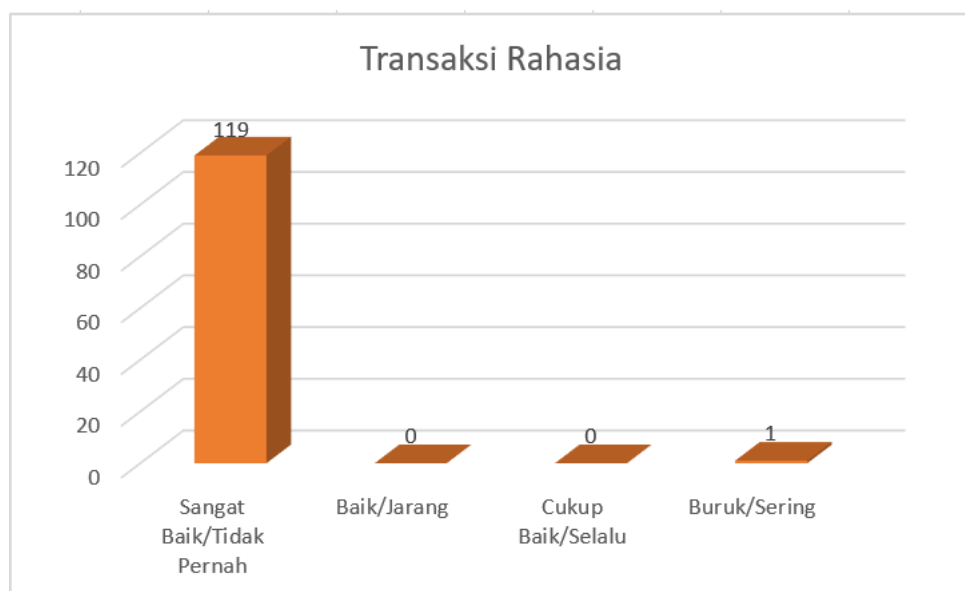
Gambar 13 - Grafik pada indikator perbuatan curang

3.3.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta bersih dari adanya transaksi rahasia.

Tabel 12 - Indeks pada indikator transaksi rahasia

No	Jawaban	SKOR	Frekuensi	%	Skor*f
1	Sangat Baik/ Tidak Pernah	4	119	99	476
2	Baik/ Jarang	3	0	0	0
3	Cukup Baik/ Selalu	2	0	0	0
4	Buruk/ Sering	1	1	1	1
Jumlah			120	100	477
NRR Per Unsur					3,98



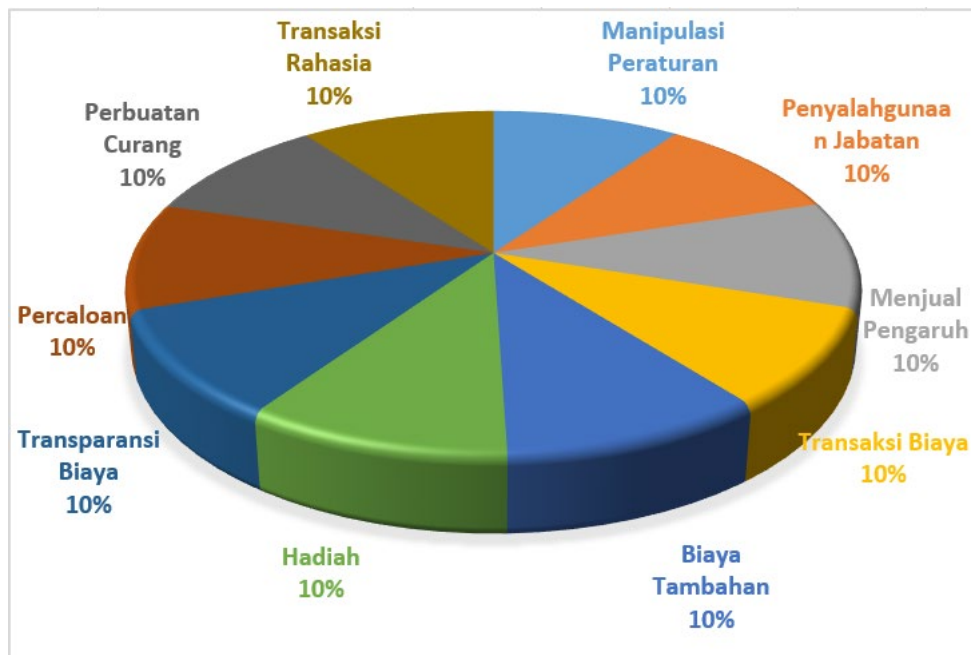
Gambar 14 - Grafik pada indikator transaksi rahasia

3.4 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta

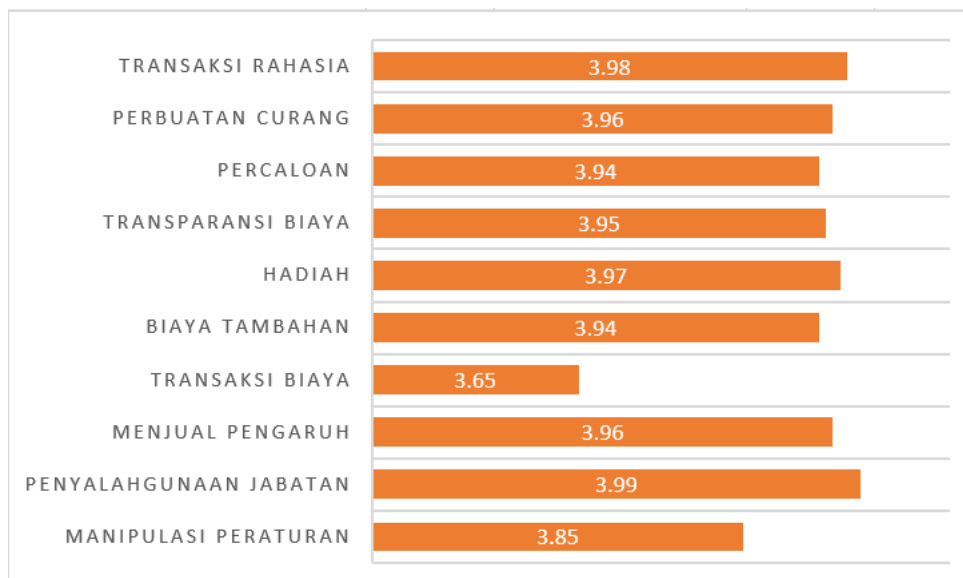
Berdasarkan hasil analisis data dari Survey Persepsi Anti Korupsi terhadap pengguna Layanan dan Pelaksanaan Tusi Pengadilan Agama Yogyakarta, disampaikan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk Periode Semester II (Juli-Desember) Tahun 2022 sebesar 97,94 berada pada kategori “**Sangat Baik**” dikonversikan dengan nilai interval Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3,96** dan termasuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI.

Tabel 13 - Persepsi korupsi satuan kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 2.59	25.00 - 64.99	1	Tidak bersih dari korupsi
2	2.60 – 3.06	65.00 – 76.60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3.06 – 3.53	76.61 – 88.30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.53 – 4.00	88.31 – 100.00	4	Bersih dari korupsi



Gambar 15 - Grafik indeks persepsi korupsi semua indikator



Gambar 16 - Grafik indeks persepsi chart balok

3.5 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 14 - Isian masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Agama Yogyakarta

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan
1	Semoga semakin sukses dan tingkatkan etos kerja, tetap semangat
2	Tidak ada, karena semua sudah sangat baik, sesuai prosedur. Tetap dijaga saja
3	Cukup bagus

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki Indeks Persepsi Korupsi Periode Semester II (Juli-Desember) Tahun 2022 sebesar **3,92** atau dikonversi pada interval **97,96** dengan kategori **“Sangat Baik”** dan termasuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,85
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,99
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,96
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,65
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,94
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,97
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,95
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,94
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,96
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,98

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta Periode Juli s/d Desember Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,86 atau masuk pada persepsi 88.31 – 100.00.

Sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa semua indikator pada persepsi bersih dari korupsi, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali.